

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah untuk mendorong pembangunan di daerah dan melaksanakan APBD, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, baik bantuan jangka panjang maupun bantuan jangka pendek seperti pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya sehingga distribusi barang publik dan bantuan masyarakat dapat lebih lancar dan efektif. Hastuti (2018) Menyatakan bahwa adanya pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan, karena salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut desentralisasi fiskal. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama kebijakan pembangunan nasional dan otonomi. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memprioritaskan pelayanan yang terfokus pada kebutuhan masyarakat sampai dengan wilayah pelosok, baik dari sudut pandang nilai maupun keunggulan.

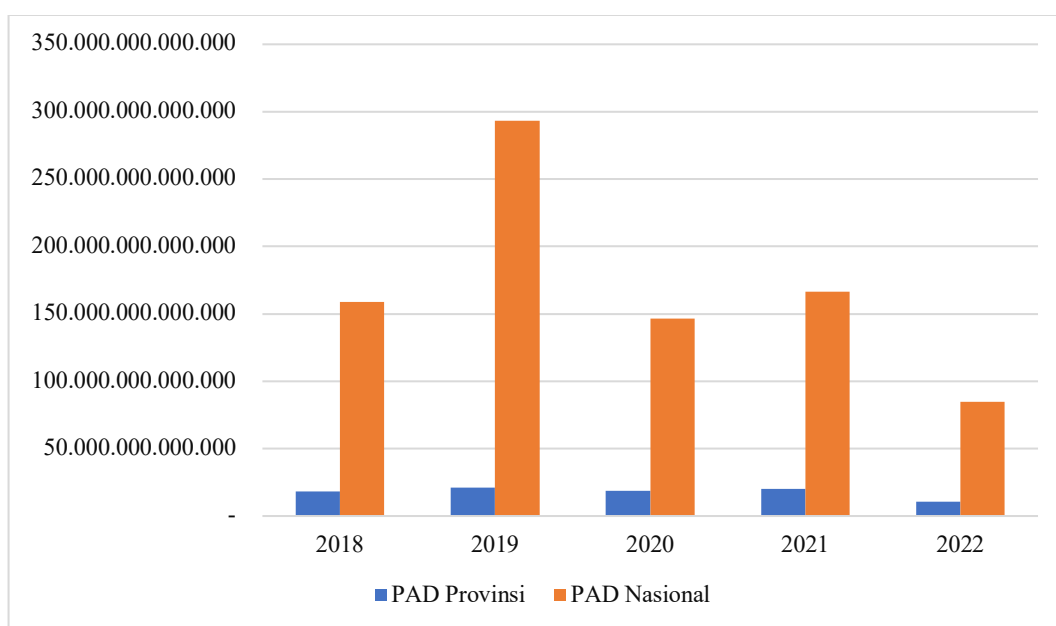
Kunci keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah adalah pendapatan fiskal daerah yang memadai untuk menyediakan dana bagi pelaksanaan otonomi daerah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan misi pemerintahan, kebijakan layanan publik serta pembangunan.

Selain itu, tren globalisasi yang membuat daya saing tiap negara menjadi kuat. Usaha penguatan daya saing negara dapat dilaksanakan jika pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah (Putri et.al 2023). Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan derajat pengelolaan pemerintah daerah dan mendorong pembangunan daerah yang lebih bertanggung jawab.

Salah satu alat utama yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan otonomi di suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan komponen penting dalam menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sumber PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara ringkas PAD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan dan undang-undang daerah. Semakin besar sumbangan PAD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka akan semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Basri et al., 2013). Peningkatan PAD adalah modal keberhasilan untuk mencapai pembangunan daerah dan komponen-komponen pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja daerah berdasarkan pendapatan

daerah yang diterima yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah sebagai sarana desentralisasi. Sebagai tolak ukur perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah Nasional dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi, berikut grafik yang membandingkan perbedaan dalam rentang waktu antara tahun 2018-2022.



Gambar 1.1

PAD Nasional dan PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa PAD Provinsi secara umum menggambarkan perubahan sepanjang waktu yang bersangkutan dengan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Selain itu pada era tersebut, PAD Nasional juga mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan pada tahun 2018 hingga 2021, kemudian menurun pada tahun 2022.

Dimana PAD provinsi lebih mengalami fluktuasi yang signifikan dibandingkan PAD nasional. Dilihat secara keseluruhan PAD nasional dan provinsi telah mengalami fluktuasi. PAD Provinsi pada tahun 2018 hingga 2022 akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, sedangkan PAD Nasional akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 menduduki peringkat ke tiga (3), yang menunjukkan keberhasilan pencapaian pendapatan yang signifikan. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 berhasil melampaui target pendapatan, dengan PAD sebesar Rp. 22,9 Triliun. Salah satu kontribusi utama dari PAD Jawa Barat adalah pajak seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

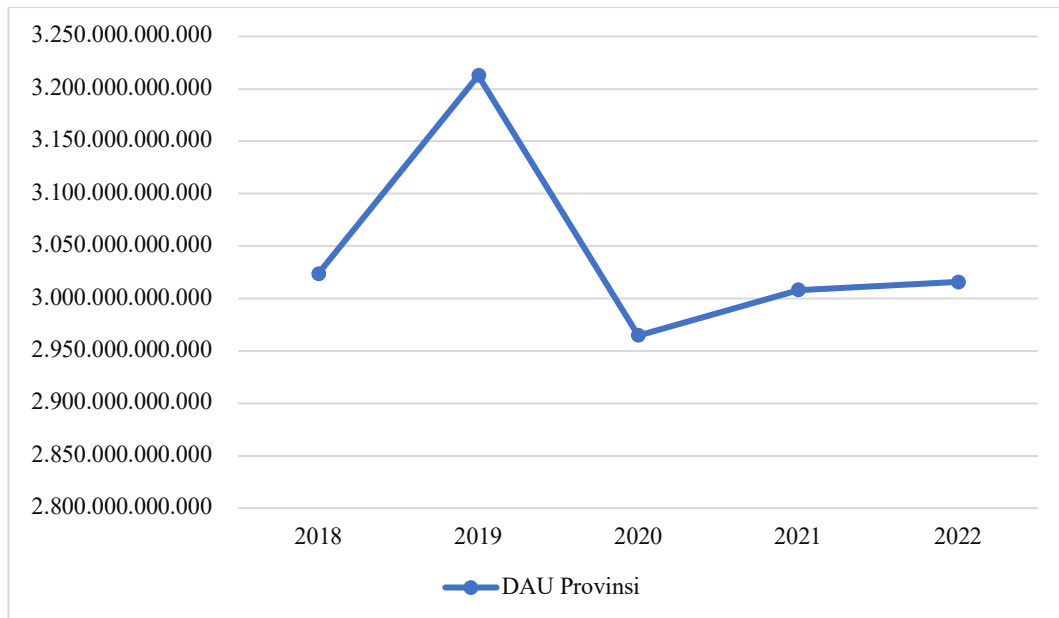
Salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah belanja modal. Peningkatan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah merupakan hal penting dalam meningkatkan PAD. Hal ini memungkinkan Masyarakat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, sehingga meningkatkan jumlah PAD melalui pajak daerah dan retribusi yang diterima dari masyarakat. Peningkatan infrastruktur juga membantu produktivitas masyarakat secara umum, yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Maka semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula kemampuan dalam merealisasikan belanja modal.

Terdapat beberapa wilayah memiliki tingkat PAD yang tinggi namun belanja modal rendah. Faktor yang mempengaruhinya adalah dampak pengalokasian PAD untuk belanja lain yang tidak termasuk belanja modal.

Sebaliknya jika PAD rendah namun belanja modal tinggi, hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh yang signifikan dari DAU dan DAK terhadap belanja modal. Selain itu, kenaikan PAD diperkirakan akan meningkatkan investasi pemerintah daerah dalam belanja modal. Namun, terdapat fluktuasi dalam pengalokasian belanja modal di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Secara umum Dana Alokasi Umum (DAU) mewakili upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah negara. Pada umumnya daerah yang memiliki potensi ekonomi yang lebih rendah atau tingkat kesejahteraan yang kurang baik maka akan cenderung mempunyai alokasi yang lebih tinggi. Dalam penelitian (Halim, 2014) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka upaya desentralisasi. Selain itu, Dana Alokasi Umum juga digambarkan sebagai dana yang diberikan setiap tahun kepada pemerintah pusat dengan tujuan mengembangkan setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Besaran DAU yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing daerah, yang ditentukan oleh potensi perekonomian masing-masing daerah dan kebutuhan otonominya. DAU diharapkan mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, menciptakan keadilan sosial, dan memberikan dukungan finansial kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan infrastruktur. Selain itu, DAU dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi perekonomian daerah, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi

diberbagai daerah. Berikut adalah data Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.



Gambar 1.2

Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sumber: www.djpk.kemekeu.go.id

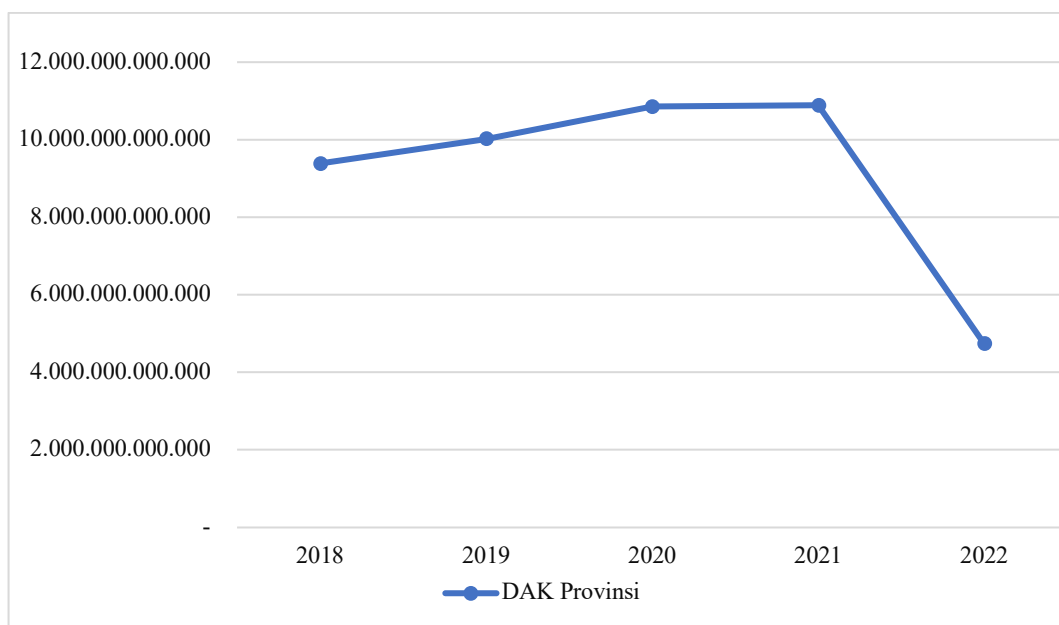
Berdasarkan grafik tersebut terlihat terjadi fluktuasi penerimaan Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2019 DAU mencapai titik tertinggi, namun nilainya menurun pada tahun 2020, sebelum kembali naik pada tahun 2021 dan 2022. Fluktuasi ini dapat menjadi pertimbangan ketika menganalisis kebijakan keuangan dan anggaran daerah. Selain itu, DAU yang relatif stabil antara tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan yang tetap dari pemerintah pusat dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk belanja modal.

Namun perubahan DAU juga dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran belanja modal di masa depan.

Fenomena realistik yang terjadi pada DAU adalah terjadinya fluktuasi dengan kenaikan dan penurunan realisasi belanja daerah. Selain itu, jumlah belanja modal yang dianggarkan kurang dari 20% dari total anggaran belanja di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara besarnya DAU dengan pengalokasian belanja modal. Karena fluktuasi DAU dapat berdampak pada pertumbuhan belanja modal yang berdampak negatif terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pemerataan fiskal dan kemandirian daerah merupakan alat penting untuk meningkatkan kapasitas keuangan suatu daerah adalah DAU. Akan tetapi distribusi DAU sering kali tidak merata sehingga mengakibatkan kesenjangan antar daerah. Beberapa daerah yang bergantung pada DAU mungkin tidak dapat mengembangkan strategi pendapatan alternatif, sehingga cenderung bergantung pada alokasi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan belanja modal yang kurang ideal karena dampaknya pada DAU yang dapat mengurangi inovasi dan investasi.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), setiap pemerintah daerah juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah jenis pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu pengembangan kegiatan-kegiatan khusus yang bersifat regional dan sejalan dengan nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah jenis dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk unit pemerintah tertentu untuk

tujuan tertentu. Dana ini diberikan sebagai sarana untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah dan memastikan bahwa dana yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan spesifik yang telah diidentifikasi. Pemberian DAK biasanya dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional dan agenda pemerintah pada jangka waktu tertentu. DAK diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin pemerataan dana serta mendorong Pembangunan berkelanjutan diseluruh wilayah negara. Berikut adalah data Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.



Gambar 1.3

Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

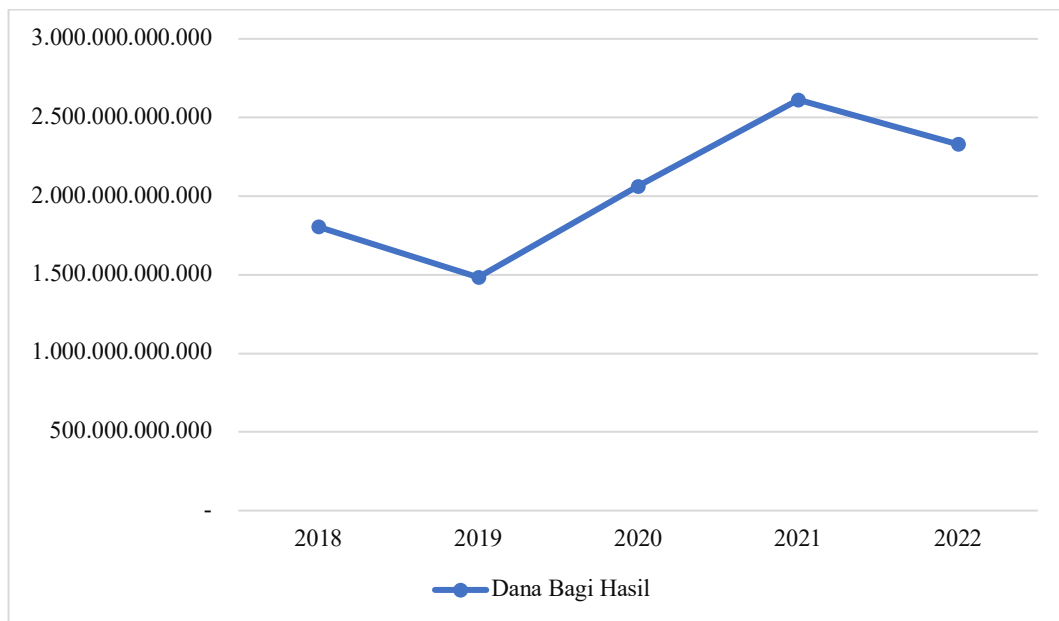
Berdasarkan data di atas, terlihat DAK mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 hingga tahun 2021, namun mengalami penurunan yang cukup

drastis pada tahun 2022. Kenaikan tersebut memberikan komitmen pemerintah dalam memajukan pembangunan daerah. Namun penurunan DAK pada tahun 2022 mungkin disebabkan oleh faktor lain, seperti perubahan perekonomian nasional atau kebijakan fiskal. Peningkatan DAK dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai proyek pembangunan di daerah, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun penurunan nilai harus menjadi pertimbangan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Fenomena realistik DAK suatu wilayah yang rendah dibandingkan dengan belanja modal tinggi, sehingga hal itu dapat menunjukkan adanya ketergantungan terhadap sumber pendapatan lain selain DAK untuk membiayai belanja modal. Ketergantungan terhadap DAK yang rendah namun belanja modal tinggi dapat mengidentifikasi perlunya diversifikasi sumber pendapatan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan belanja modal. Oleh karena itu, ketidakseimbangan antara DAK dengan belanja modal dapat mempengaruhi anggaran pengalokasian secara keseluruhan. Hal itu, penting untuk memastikan keseimbangan antara DAK dan belanja modal untuk meminimalkan anggaran yang optimal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika tidak ada upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara DAK dengan belanja modal, maka bisa saja terjadi defisit anggaran dan ketidakberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena pembangunan daerah yang melebihi pendapatan nasional dapat menyebabkan kurangnya kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah karena penyaluran DAK untuk mendukung proyek-proyek yang sedang berjalan, seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir banyak

daerah di Jawa Barat menerima DAK untuk pembangunan jalan dan jembatan. Tetapi penyaluran DAK sering terhambat oleh prosedur administratif yang lambat dan kapasitas teknis yang tidak memadai di daerah tersebut. Sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengalokasian belanja modal dan menghambat implementasi proyek yang direncanakan. Selain itu, DAK juga merupakan sumber pendanaan yang penting dalam pengalokasian anggaran belanja modal pada suatu daerah. Sehingga jika DAK rendah tetapi belanja modal tinggi, maka pemerintah daerah kemungkinan berhasil mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Selain DAU dan DAK ada juga Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah. DBH merupakan sumber modal yang sangat potensial dan salah satu alat utama yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi pendapatan pembangunan dan belanja daerah yang tidak bersumber dari PAD saja melainkan dari DAU dan DAK. Dalam pengalokasian belanja modal, DBH sebagai bagian dari APBN ditugaskan kepada daerah berdasarkan presentase dalam rangka melaksanakan kegiatan desentralisasi. Berikut adalah data Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.



Gambar 1.4

Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir, DBH telah meningkat secara signifikan dengan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 hingga 2022, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya peningkatan pendapatan pajak dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif.

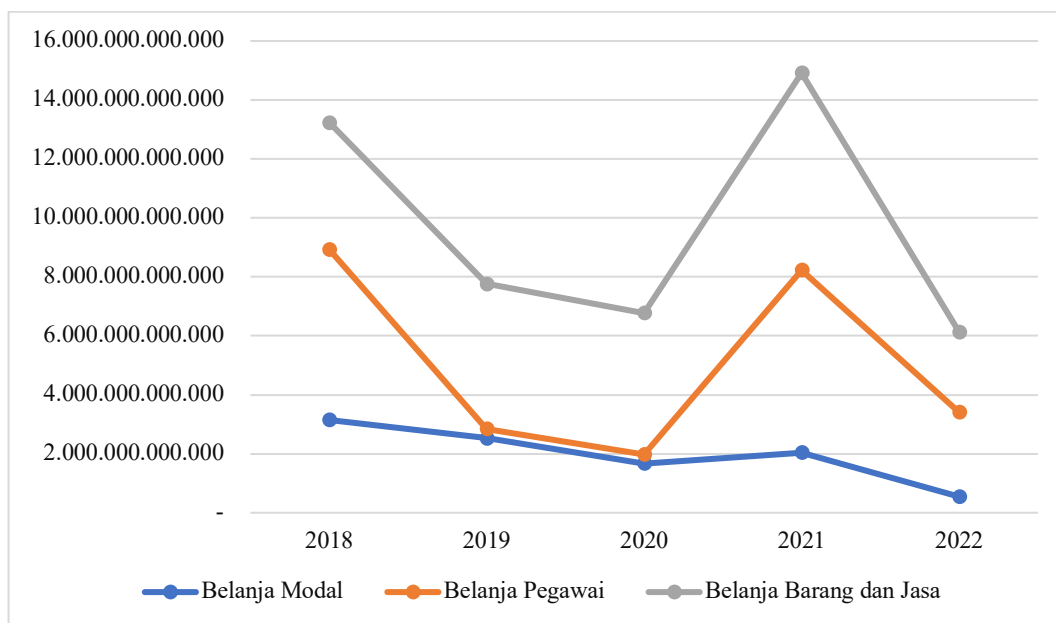
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dana bagi hasil, yang paling signifikan adalah belanja modal. Dalam hal ini keuangan daerah, belanja modal dapat didefinisikan sebagai investasi di bidang teknologi, infrastruktur, atau sumber daya manusia yang meningkatkan kemampuan daerah dalam penghasilan

pendapatan dan meningkatkan standar pelayanan publik. Serta pengalokasian yang bijak dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, sehingga meningkatkan dana bagi hasil. Semakin meningkat DBH maka pengalokasian belanja modal juga meningkat yang berarti DBH ini memiliki peran penting dalam pengalokasian belanja modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan Masyarakat.

Belanja Daerah yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu jenis belanja daerah yaitu belanja modal. Menurut Halim Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang mempunyai manfaat sebagai aset atau kekayaan daerah yaitu dapat mengakibatkan pengeluaran rutin meningkat sebagaimana pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas aset dan mempertahankan masa manfaatnya dan meningkatkan kualitas aset (Sudaryo et al., 2021). Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi merujuk pada pengalokasian belanja modal. Pengalokasian belanja modal adalah suatu pengalokasian dana dalam bentuk pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bertujuan untuk menambah aset tetap seperti sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan fasilitas publik dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah mengalokasikan belanja modal ini penting karena realisasi belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan berdampak pada roda perekonomian daerah. Pengalokasian belanja modal diharapkan dapat meningkatkan bantuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Kegunaan pengalokasian belanja modal adalah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap pemerintahan disuatu wilayah harus menjaga stabilitas perekonomian di wilayah tersebut.

Berikut adalah data Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.



Gambar 1.5

Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Dari data di atas terlihat bahwa belanja modal di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana realisasi belanja modal dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 realisasi belanja modal mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pada tahun 2022 realisasi belanja modal mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disignifikan dikarenakan pandemi COVID-19 yang

berdampak negatif terhadap perekonomian dan pemerintahan. Namun pada tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi belanja modal yang mungkin disebabkan oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan anggaran pemerintah. Serta belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menunjukkan terjadinya fluktuasi dari tahun ke tahun.

Data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disajikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Tahun 2021 Provinsi Jawa Barat mencapai 85% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Dimana Provinsi Jawa Barat merupakan capaian realisasi belanja daerah provinsi yang tertinggi di provinsi lainnya di antara Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah.

Pengalokasian belanja modal merupakan komponen penting belanja daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal ini disebut untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional. Pengalokasian belanja modal perlu difokuskan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana, sehingga kelancaran tugas pemerintah dan fasilitas publik. Meskipun belanja modal merupakan salah satu jenis investasi, namun perbedaan antara belanja modal dan belanja pegawai dapat menimbulkan permasalahan seperti kurangnya pemeliharaan dan pengembangan aset daerah, serta berdampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Serta ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan belanja modal lebih kecil dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Salah satu alasan utamanya adalah kecenderungan pemerintah daerah untuk memprioritaskan tugas-tugas rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan melakukan investasi jangka panjang. Hal

ini dapat menimbulkan permasalahan bagi pembangunan dan pemeliharaan aset daerah serta berpotensi menghambat pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya keuangan dan kurangnya perencanaan pembangunan jangka panjang juga dapat memengaruhi pengalokasian belanja modal.

Belanja modal dapat meningkatkan produktivitas perekonomian dan pelayanan publik, namun perlu diingat bahwa pengelolaannya harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Selain itu struktur alokasi belanja modal juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun mengenai alokasi belanja modal di Jawa Barat ada beberapa kendala yang signifikan yaitu struktur alokasi belanja modal yang belum berorientasi pada publik dan masih terbentur dengan kepentingan golongan tertentu. Artinya alokasi belanja modal tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya berkelanjutan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga hal ini menghambat untuk meningkatkan standar pelayanan publik.

Belanja modal memiliki peran yang penting dalam pemenuhan kebutuhan belanja modal, pelayanan seperti sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Tetapi alokasi anggaran belanja pendapatan dan belanja negara di Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Demi keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Barat maka pemerintah kota dan kabupaten Jawa Barat diharapkan untuk meningkatkan PAD. Sampai dengan Maret 2023 belanja pegawai dan belanja modal masih tumbuh minus juga realisasi TKD pada triwulan 1 2023

masih tumbuh negatif sebesar 5,37 persen. Dalam kasus tertentu, pengalokasian belanja modal dapat mengalami gangguan, serupa dengan fluktuasi yang terjadi pada umumnya. Seperti pada kondisi pandemi kemarin harus memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan yang memangkas pagu belanja pemerintah dengan jumlah yang cukup signifikan. Pemerintah daerah hendaknya mendasarkan kebijakan belanja modal pada kebutuhan daerah dalam hal infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena fasilitas umum tersebut masih belum berkembang dan belum memenuhi standar atau tingkat kualitas yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, mekanisme belanja perlu disusun sedemikian rupa agar proses belanja dapat berjalan terkendali. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk dapat mengelola belanjanya secara efektif.

Anggaran yang optimal untuk pembangunan dan pemeliharaan aset daerah dapat dilakukan dengan pengalokasian belanja modal. Jika seluruh pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dengan tingkat ketinggian alokasi belanja modal, maka hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengalokasian anggaran belanja modal yang tinggi dapat menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan di sektor-sektor terkait. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2022 pemerintah provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,45%, namun berbeda halnya dengan kota dan kabupaten yang berada di provinsi Jawa

barat. Presentasi realisasi pendapatan APBD provinsi Jawa Barat juga berada pada peringkat ke 5 daerah tertinggi dengan capaian 63,40%. Meskipun APBD provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke 5 yang menunjukkan praktik kerja ekonomi yang baik. Namun, hal ini tidak secara otomatis mencerminkan kinerja setiap kota dan kabupaten di wilayah tersebut. Sehingga kinerja ekonomi dan kabupaten di provinsi Jawa Barat bervariasi. Karena beberapa kota dan kabupaten tertentu mungkin mempunyai kondisi ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan dibandingkan kota dan kabupaten lain, tergantung pada beberapa faktor seperti industri, infrastruktur, dan sumber daya. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa faktor kontijensi, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Oleh karena itu, belanja modal merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan belanja modal yang dilaksanakan dengan baik berfungsi sebagai indikator kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memerhatikan pengaruh PAD, DAU, DAK dan pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal guna memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dalam memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen dan Pengalokasian Belanja Modal sebagai variabel dependen di Provinsi Jawa Barat, maka penulis bermaksud untuk melakukan

penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pernyataan mengenai gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pengalokasian Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022 secara simultan.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022 secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pengalokasian Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022 secara simultan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2018-2022 secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembang Ilmu

- a. Bagi pengembangan ilmu, peneliti ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

- a. Bagi kepentingan pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya memaksimalkan sumber daya lokal guna meningkatkan standar pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.

1.5 Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan di bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2024. Untuk rincian waktu pengerjaan penelitian ini terlampir dalam lampiran 1.